



Pengaruh Ekonomi Politik Terhadap Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi

M.Zuhriadi¹, Reneva Manurung², Rista Y. Lumbangaol³, Bonaraja Purba⁴

^{1,2,3,4}Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara

E-mail: muhammadzuhriadi9@gmail.com¹, evamnrg27@gmail.com², ristayoseva@gmail.com³,
bonarajapurba@gmail.com⁴

Abstract. *This research aims to discuss the influence between political economy and international trade and economic growth. This research uses a qualitative method which aims to determine the impact that monetary and fiscal policies from the political economy can have on international traders and the economic growth of a country. In Indonesia, the government is focusing on infrastructure development as part of its New Political Economy (EPB) strategy to increase people's productivity and standard of living. It is hoped that through various financing innovations and private involvement, infrastructure development can continue in a sustainable manner. Indonesia's economic policy must continue to be directed towards inclusive and quality economic development, with the aim of reducing poverty, reducing inequality and increasing employment opportunities. It is hoped that the results of this research will increase readers' insight into the influence of political economy on international traders and economic growth.*

Keywords: *Political Economy, International Trade, Government Policy, Infrastructure Development*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh antara ekonomi politik dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dampaknya kebijakan moneter dan fiskal dari ekonomi politik dapat mempengaruhi pedagang internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari strategi Ekonomi Politik Baru (EPB) untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup masyarakat. Diharapkan melalui berbagai inovasi pembiayaan dan keterlibatan swasta, pembangunan infrastruktur dapat berlanjut secara berkelanjutan. Kebijakan ekonomi Indonesia harus terus diarahkan untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, dengan tujuan mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan lapangan kerja. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh ekonomi politik terhadap pedagang internasional dan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Ekonomi Politik, Perdagangan Internasional, Kebijakan Pemerintah, Pembangunan Infrastruktur

PENDAHULUAN

Saat ini, topik mengenai pengaruh ekonomi politik terhadap perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi memiliki kepentingan yang sangat tinggi dalam dunia ekonomi. Ekonomi politik adalah studi yang mendalami hubungan antara kebijakan ekonomi dan penguasaan politik, serta bagaimana keduanya saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Topik yang sangat penting dalam dunia ekonomi saat ini adalah perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Keduanya memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Pengaruh ekonomi politik terhadap perdagangan internasional dapat dilihat pada kebijakan perdagangan suatu negara. Misalnya, kebijakan perdagangan proteksionis dapat

membatasi impor barang dari negara lain dan menaikkan harga barang dalam negeri. Namun kebijakan ini juga dapat memicu tindakan balasan dari negara lain dan membatasi ekspor barang dari negara tersebut. Di sisi lain, kebijakan perdagangan bebas dapat meningkatkan perdagangan internasional dan memperkuat hubungan ekonomi antar negara.

Faktor ekonomi politik juga mempengaruhi pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di samping itu, stabilitas politik dan keamanan juga adalah faktor yang dapat memengaruhi investasi asing dan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Artikel ini akan membahas pengaruh ekonomi politik terhadap perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi secara mendetail. Dengan memahami kaitan antara kebijakan ekonomi dan kekuasaan politik, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana suatu negara dapat meningkatkan perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Metode menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pertanyaan yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu etika pada fakta yang ada (Ardianto, 2019; Semiawan, 2010). Metode kualitatif juga terbuka dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada proses penelitian (Ardianto, 2019).

Penelitian ini dikatakan kualitatif karena pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya, dan hasil yang diharapkan pun bukanlah berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, melainkan makna atau segi kualitas dari fenomena yang di amati. Dalam penelitian ini, peneliti menyelidik bahwa etika memberikan pandangan yang baik dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah di tentukan.

PEMBAHASAN

Pengertian Ekonomi Politik dan Jenis Perdaganganannya

Ekonomi politik adalah suatu hal yang sering muncul dan menjadi isu yang menarik untuk dibahas baik oleh pemikir ekonomi, pemerintah ataupun masyarakat umum. Ekonomi politik memuat beberapa hal mengenai produksi, perdagangan dan beberapa kaitannya dengan hukum serta pemerintah. Ekonomi politik membuat kebijakan ekonomi sebagai suatu tindakan atau keputusan yang wajib didiskusikan lebih mendalam untuk membentuk kerangka kerja agar

dapat dianalisis dan dipergunakan untuk berjalannya kegiatan ekonomi yang dilaksanakan disuatu negara. Suatu kebijakan dari ekonomi politik bisa memberikan gambaran mengenai beberapa kelompok yang turut serta mendukung dan menolak kemudian melihat bagaimana seorang individu bisa meningkatkan utilitas melalui partisipasinya dalam aktivitas dunia ekonomi politik.

Menurut Staniland dalam Deliarnov (2006:8), ekonomi politik memiliki makna sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Namun ada juga pandangan lain jika ekonomi politik tidak terbatas pada studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Hal ini dikemukakan oleh Caporaso & Levine dalam Deliarnov (2006:8), menurutnya ekonomi politik memiliki maksud untuk memberikan saran mengenai pengelolaan permasalahan dalam ekonomi kepada para penyelenggara negara. Secara sederhana dikatakan bahwa ekonomi politik merupakan cara dan tindakan yang dilakukan pihak pemerintah dalam bidang ekonomi untuk mencapai tujuan dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

Kemudian jenis perdagangan dalam ekonomi politik memiliki tipe, kata kunci dan rujukan pengambilan keputusan yaitu : Tipe 1 : Inter-Industry dengan kata kunci memilih ekspor dan impor. Rujukannya mengarah pada keunggulan komparatif. Contohnya Jepang unggul dalam bidang motor maka mereka mengekspor motor dan tidak unggul dalam beras sehingga mereka harus mengimpor beras dari negara lain, walaupun di Jepang ada petani yang memproduksi beras. Tipe 2 : Horizontal Intra Industry menggunakan kata kunci ekspor dan impor sekaligus sektor ekonomi dan tahapan proses yang sama asalkan produknya berbeda. Rujukannya diferensiasi produk dan contohnya Amerika mengekspor dan mengimpor keju tetapi beda jenis keju yaitu yang diekspor blue cheese dan yang diimpor adalah food service cheese. Tipe 3 : Vertical Intra Industry. Kata kuncinya adalah ekspor dan impor bisa dilakukan sekaligus pada sektor ekonomi yang sama tetapi dalam tahapan proses yang berbeda dengan rujukan fragmentasi (international product sharing). Contohnya China mengimpor komponen komputer dan mengekspor komputer yang sudah jadi. Dalam perspektif pemasaran global komponen komputer dan komputer yang sudah jadi itu satu sektor ekonomi yang sama, satu produk yang sama tetapi proses produksi yang berbeda.

Dalam pembahasan mengenai ekonomi politik dan perdagangan internasional muncul sebuah pertanyaan yang paling menarik yaitu sebenarnya dalam mekanisme ini siapa yang mendapatkan untung. Jika dilihat perhitungan ekonomi dalam ekonomi internasional biasanya dihitung keuntungan atau kerugian suatu negara secara makro tetapi tidak pernah dilihat secara fakta apakah semua industri di negara tersebut ikut mengalami untung dan rugi. Kebijakan ekonomi internasional tidak hanya sekedar persoalan pertimbangan ekonomi tetapi juga

membahas mengenai kebijakan ekonomi politik. Ekonomi internasional tidak selalu berdasarkan pada teori keunggulan absolut, komparatif ataupun kompetitif tetapi juga pada kebutuhan mencari kestabilan atau proteksi dalam hal politik.

Beberapa pendekatan ekonomi politik yaitu:

Focus	Name	Insight
Country-based	Realism	There are security externalities associated with international trade that need to be managed by country governments.
Country-based	Institutionalism	Institutional structures within country governments affect trade policy outcomes.
Factor-based	Heckscher-Ohlin model Stolper – Samuelson theorem	Under factor mobility within a country, different factors can win or lose from increased trade.
Sector-based	Specific factors model	With sector-specific factors, whether factor win or lose can depend on whether they are specific to an export or import -oriented sector.
Firm-based	Firm Based	The exposure of firms to trade or international capital mobility can influence the posture of these firms to trade liberalization.

Untuk pendekatan ekonomi yang paling sering digunakan adalah Heckscher-Ohlin Model. Di sini negara akan mengekspor produk dimana produksinya memiliki produksi yang melimpah dan negara akan mengimpor produk yang negara tersebut tidak memiliki faktor produksi yang melimpah (langka). Dalam ekonomi politik pastinya terjadi beberapa kompetisi baik kompetisi positif ataupun negatif yang mewarnai berjalannya perdagangan internasional. Dampak umum terjadinya kompetisi politik baik ditingkat nasional dan internasional akan menghasilkan atau menunjukkan siapa negara yang kuat selalu memiliki dan mencari lebih banyak menjalin hubungan ekonomi global dalam upaya meningkatkan pendapatan negaranya. Di sisi lain negara yang lemah akan berupaya untuk menghilangkan batasan ekonomi ditataran nasional dan global dalam rangka meminimalisir hingga bahkan menghilangkan kerugian yang dapat mereka rasakan.

Dinamika pertarungan ekonomi politik yang terlaksana antara negara yang kuat dengan negara yang lemah akan membentuk berbagai kebijakan ekonomi yang dianut oleh pemerintah negara terkait. Dalam upaya memahami perkembangan dalam ekonomi politik dalam perdagangan internasional, diperlukan pemahaman yang berkaitan dengan teori-teori ekonomi, mengetahui pola interaksi politik antar pemerintah, kebijakan domestik dari masing-masing negara, sampai mengenal institusi organisasi politik internasional.

Pengaruh Ekonomi Politik dan Kebijakan Pemerintah Yang Memberikan Dukungan Terhadap Pembangunan

Ekonomi politik telah memberikan pengaruh yang besar bagi Indonesia dan juga negara lain. Di Indonesia sendiri untuk pembangunan ekonomi dapat terlihat atau tercermin dari pembangunan infrastruktur. Pendekatan ekonomi politik dan infrastruktur masuk kedalam ranah Ekonomi Politik Baru (EPB). Sesuai pidato Presiden Jokowi, Visi Indonesia, Sentul 14 Juli 2019 menyatakan bahwa “*Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar sudah kita bangun, ke depan akan kita bangun lebih cepat. Infrastruktur seperti jalan tol, kereta api, kita sambungkan dengan kawasan industri rakyat, ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, perikanan. Arahnya harus ke sana, fokusnya harus ke sana*”.

Dalam hubungan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi dijelaskan dalam Todaro (2006) bahwa tingkat ketersediaan infrastruktur di suatu negara adalah faktor penting dan menentukan bagi tingkat kecepatan dan perluasan pembangunan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan modal atau kapital dalam upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara serta usaha peningkatan taraf hidup masyarakat secara luas. Penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh David Aschauer (1989) dengan menggunakan model produksi *Cobb-Douglas*, diperoleh hasil bahwa terdapat korelasi positif antara investasi infrastruktur dengan produktivitas output yang dihasilkan. *Core infrastructure* seperti transportasi, energi, dan air memiliki dampak yang lebih besar dari pada infrastruktur lain seperti bangunan dan rumah sakit.

Untuk melakukan pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah akan bekerja sama dengan negara lain untuk lebih mencari dan menjalin hubungan internasional agar bisa memiliki investor yang bisa membantu pemenuhan dana untuk pembangunan. Tidak lupa juga bahwa pemerintah mengikutsertakan pengusaha dalam negeri agar semakin cepat melaksanakan pembangunan. Dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan dan target yang harus dicapai maka suatu negara haruslah membangun kontribusi positif dan sinergitas diantara seluruh pemangku kepentingan sebagai perwujudan spirit *Indonesia incorporated*.

Pemerintah berharap bahwa dengan berbagai inovasi pembiayaan harus dapat mencapai tujuan utamanya yaitu memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur disertai dengan kontribusi APBN dalam merancang skema pembiayaan yang lebih luwes dalam pengembangan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan. Selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pihak swasta diharapkan terlibat aktif mendanai infrastruktur. Semangat untuk bekerjasama dan bahu

membahu, diharapkan dapat ditingkatkan agar mempercepat keberlanjutan pembangunan infrastruktur sehingga dampak kehadiran infrastruktur bisa segera dirasakan publik.

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada upaya menyambungkan dengan sentra-sentra produktif ekonomi rakyat, akan mampu menggerakkan perkembangan ekonomi regional dengan lancarnya konektivitas antara satu wilayah dan daerah lain, diharapkan laju distribusi barang akan semakin lancar. Sehingga harga barang akan semakin kompetitif dan terjangkau dan secara ekonomis serta akan meningkatkan daya saing produk-produk ekonomi lokal dan tumbuhnya pusat bisnis baru di berbagai wilayah secara merata. Munculnya peningkatan produktivitas akan memberikan efek pengganda yang lebih besar karena akan tumbuh investasi yang dapat menunjang berkembangnya industri pengolahan, sehingga kita tidak selamanya kita tergantung pada ekspor sumber daya alam mentah. Kebijakan ekonomi Indonesia harus terus diarahkan untuk pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkualitas yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja untuk mengatasi masalah pengangguran.

KESIMPULAN

Berdasarkan data diatas Ekonomi politik membuat kebijakan ekonomi sebagai suatu tindakan atau keputusan yang wajib didiskusikan lebih mendalam untuk membentuk kerangka kerja agar dapat dianalisis dan dipergunakan untuk berjalannya kegiatan ekonomi yang dilaksanakan disuatu negara. Ekonomi politik telah memberikan pengaruh yang besar bagi Indonesia dan juga negara lain. Di Indonesia sendiri untuk pembangunan ekonomi dapat terlihat atau tercermin dari pembangunan infrastruktur. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur yang berfokus pada upaya menyambungkan dengan sentra-sentra produktif ekonomi rakyat, akan mampu menggerakkan perkembangan ekonomi regional dengan lancarnya konektivitas antara satu wilayah dan daerah lain, diharapkan laju distribusi barang akan semakin lancar. Sehingga harga barang akan semakin kompetitif dan terjangkau dan secara ekonomis serta akan meningkatkan daya saing produk-produk ekonomi lokal dan tumbuhnya pusat bisnis baru di berbagai wilayah secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Sirait, A. (2019). Peranan Politik hukum investasi Dalam Pembangunan ekonomi Indonesia. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 2(1), 59–76. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i1.1341>
- Pratiwi, A. (2021). Kebijakan Ekonomi: Perspektif Ekonomi Politik Dalam Pembangunan di Indonesia. *Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.31334/abiwara.v3i1.1847>
- Hiscox MJ. *Perdagangan Internasional dan Konflik Politik: Perdagangan, Koalisi, dan Mobilitas*. Oxford: Pers Universitas Princeton; 2002. [[Google Cendekia](#)]
- Jones, Walter S. 1993. *Logika Hubungan Internasional 2: Kekuasaan, Ekonomi Politik Internasional, dan Tatahan Dunia*. Jakarta.
- Mansbach, Richard W., and Kristen L. Rafferty. 2008. *Introduction to Global Politics*. New York: Routledge.
- Ravenhill, John. (2008). “The Study of Global Political Economy”, dalam John Ravenhill, *Global Political Economy*. Oxford: Oxford University Press, pp.18-25.
- Deliarnov. 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta. Erlangga